

PERANAN PETUGAS KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Syarat-syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana

OLEH

Z U R A E D A H

NPM : 09 851 0024

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

ABSTRAK

PERANAN PETUGAS KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH
ZURAEDAH
NPM : 09 851 0024

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Penataan kebersihan sebagai suatu ilmu pemerintahan meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya kebersihan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan yang baik. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu berupa pemaparan terhadap peranan petugas kebersihan dalam meningkatkan kebersihan di Kecamatan Lubuk Pakam.

Permasalahan yang diteliti adalah “Bagaimana petugas kebersihan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan armada pengangkutan sampah belum optimal. Dengan armada pengangkutan yang terdiri dari 10 unit *Arm Roll Truck* yang beritansi 6 trip/hari, 10 unit *Dump Truck* yang beritansi 2 trip/hari ternyata hanya mampu mengangkut 79,24 % atau 3.396 m³ dari total timbulan sampah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penempatan TPS atau kontainer yang strategis adalah di lahan yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten, agak jauh dari permukiman, dapat dilalui oleh kendaraan/truk pengangkut sampah serta pengangkutan sampahnya tidak boleh lebih dari satu hari (24 jam). Sistem TPS yang tepat untuk Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah jenis kontainer tertutup atau dengan sistem transfer depo. Penanganan sampah dengan Sistem *Open Dumping* yang saat ini diterapkan di TPA Sampah Tanjung Morawa sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di TPA. Hal ini ditunjukkan dari kualitas air lindi yang telah melebihi Baku Mutu Lingkungan, sedangkan kualitas udara ambien di TPA Tanjung Morawa masih memenuhi Baku Mutu Lingkungan.

Penelitian ini juga menyarankan perlu dibentuknya Dinas Kebersihan yang menangani permasalahan sampah di Kabupaten Deli Serdang selama ini pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak kecamatan. Perlu penambahan jumlah Gerobak sampah dan TPS (kontainer) yang sesuai dengan kriteria standar, sehingga jumlah sampah yang terkumpul dapat diangkut dalam waktu kurang dari 24 jam. Perlu dilakukan peremajaan terhadap kendaraan pengumpul/gerobak dan truk pengangkut sampah, serta penambahan jumlah armada pengangkutan sampah sehingga tingkat pelayanan sampah semakin meningkat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

Kata Kunci: Petugas Kebersihan, Kecamatan Lubuk Pakam

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Hipotesis	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perkembangan Kota Dan Permasalahan Lingkungan	10
B. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	12
C. Good and Clean Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	15
D. Pengertian Sampah.....	20
F. Sistem Pengelolaan Sampah.....	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Populasi dan Sampel	33
B. Metode Pengumpulan Data	33
C. Variabel dan Definisi Operasional	34

D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	33
A. Sejarah Singkat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang	36
B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Lubuk Pakam	38
C. Demografi Kecamatan Lubuk Pakam	41
D. Tugas dan Fungsi Kecamatan	46
E. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	47
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan	73
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas
- Surat Balasan dari Kantor Camat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pembangunan Nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konteks pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia mengandung makna, bahwa pembangunan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di pedesaan yang merupakan kelompok terbesar rakyat Indonesia. Bahkan ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan dimaksud, yakni kesejahteraan masyarakat yang merupakan sasaran pokok dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di tanah air.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat dan juga fungsi petugas kebersihan dalam melakukan tugas-tugasnya khususnya dalam melakukan pengelolaan kebersihan di wilayah tugasnya masing-masing.

Dengan demikian peranan aparatur pemerintahan tidak hanya terbatas pada pembangunan ditingkat pusat saja tetapi juga dimaksudkan bagi segenap kegiatan pembangunan termasuk di Daerah termasuk juga di bidang pengelolaan kebersihan.

Oleh karena itu sudah saatnyalah masyarakat yang bermukim di daerah
UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang masih mempunyai keterkaitan terhadap berbagai aspek kehidupan yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

merupakan faktor penghambat terhadap partisipasinya, mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah selaku pemegang sentral dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Agustoha R. Kustawa (2005:21) mengemukakan bahwa :

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional umumnya dan pembangunan desa khususnya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secara bertahap melalui pelaksanaan pelita-pelita yang berkesinambungan dalam satu kurun waktu tertentu dengan batasan sasaran yang meningkat.

Kecamatan Lubuk Pakam merupakan salah satu daerah di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara termasuk daerah yang menjadi sasaran pembangunan Nasional. Pembangunan yang digalakkan di wilayah kecamatan ini adalah dititik beratkan pada kebersihan lingkungan.

Dengan demikian jelasnya bahwa masyarakat dan aparatur pemerintahan kecamatan adalah merupakan kelompok atau unit yang mempunyai pengaruh besar dalam rangka pelaksanaan pembangunan bangsa, yaitu pembangunan kecamatan tersebut merupakan basis atau ujung tombak pembangunan nasional.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan

manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perbuatan yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis

© Hak Cipta dan Undang-undang Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

bahan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Tidak semua masalah lingkungan di atas diangkat menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini yang salah satunya adalah masalah kebersihan. Kebersihan memiliki aspek yang sangat fundamental dalam membentuk kesehatan masyarakat, karena dengan lingkungan yang bersih maka akan didapatkan masyarakat yang sehat.

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang lingkungan hidup mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi dan peranan pemerintah sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang melalui instansinya untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan hidup termasuk mengurus masalah kebersihan ini.

Penataan kebersihan sebagai suatu ilmu pemerintahan meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya kebersihan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul: **Peranan Petugas**

Kabupaten Deli Serdang.

B. Perumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kekaburan, maka penelitian ilmiah harus dilengkapi dengan perumusan masalah. Perumusan masalah itu bertujuan agar masalah tersebut menjadi jelas hakekatnya, kedudukan serta sekaligus mencari alternatif untuk pemecahannya. (Jalaluddin Rakhmat, 2005:8).

Masalah menurut Mohammad Hatta (2009:12) adalah: “Kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (2005:35), mengatakan :
“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan semestinya apabila kita akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.

Perumusan masalah adalah salah satu syarat untuk memakai prosedur ilmiah yang ditetapkan, sehingga akan mempermudah pengumpulan data yang relevan yang menjadi pokok pembahasan dari pelaksanaan program pembangunan kelurahan, maka dengan ini penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana petugas kebersihan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dalam upaya mempermudah pengumpulan data pembahasannya bagi penulis. Adapun pengertian masalah adalah : kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam.

Adapun yang menjadi batasan permasalahan untuk penelitian ini adalah :

1. Peranan petugas kebersihan.
2. Lokasi penelitian pada Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
3. Tahun penelitian dikumpulkan dari tahun 2012.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana seorang petugas kebersihan dalam memelihara pelaksanaan kebersihan lingkungan.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung pelaksanaan program pembangunan tersebut.
- c. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan program pembangunan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

- b. Untuk menguji kemampuan berfikir penulis dalam menuangkan penulisan skripsi.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan study di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa ahli memberikan batasan tentang pengertian partisipasi, yaitu Winardi (2003:79) berpendapat: "Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut".

Selanjutnya Talizidihu Ndraha dalam Siagian (2009:2) menyatakan :

1. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan emosional. Kehadiran secara fisik semata-mata di dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, uang, jasa, buah pikiran, keterampilan dan sebagainya.
3. Kesiediaan untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan defenisi tersebut diatas, jelaslah titik berat partisipasi dibidang pembangunan adalah masyarakat telah terlibat, baik mental, emosional maupun pribadi serta kesiediaan masyarakat tersebut memberikan kontribusi atau sumbangan. Bentuk sumbangan tersebut antara lain : jasa, buah pikiran, keterampilan dan kesiediaan masyarakat untuk bertanggung jawab.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Sedangkan pengertian masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli

dibidang sosiologi, yaitu Hasan Shadily (2000:31) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain”.

Dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang terdiri dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

Sedangkan menurut Max Iver dan Page yang dikutip Soerjono Soekanto (2002:22) memberikan definisi masyarakat sebagai berikut :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.

Walaupun definisi yang diberikan para sarjana sosial tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya adalah sama, yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur antara lain :

1. Manusia hidup bersama, berarti orangnya minimum dua atau lebih
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidak sama dengan kumpulan benda mati. Oleh karena manusia adalah bertambah, yang menghasilkan manusia-manusia baru yang dapat berbicara. Mereka juga berkeinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaan kepada teman-temannya. Sebagai akibat itu timbullah sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompoknya.

3. Mereka sudah bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama untuk menimbulkan kebudayaan. Oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki untuk kesejahteraan seluruh rakyat baik yang berada di kota maupun di kelurahan.

S.P. Siagian dalam Taliziduhu (2002:25) mengemukakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari batasan-batasan tersebut di atas, berarti di bidang pembangunan masyarakat harus dilibatkan dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam rangka keberhasilan pembangunan.

Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sangat diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan kelurahan pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahannya, bimbingan, bantuan, pembinaan dari pemerintah.

F. Hipotesis

Hadari Nawawi (2003:141) menyatakan : Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan riset,

VERBA KAREMA MU HIPOTESIS adalah dugaan yang mungkin benar mungkin salah.

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah. “Apabila peranan petugas kebersihan meningkat, maka kebersihan lingkungan akan berhasil secara efektif dan efisien”.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Kota Dan Permasalahan Lingkungan

Sebuah kota pada hakikatnya merupakan suatu tempat pertemuan antara bangsa-bangsa (Soekanto, 2004: 158). Kota-kota di dunia pada hakekatnya berkembang dengan karakteristik yang berbeda-beda, karena perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis dan sejarah/kebudayaan. Keadaan geografis kota lebih mempengaruhi fungsi dan bentuk kota, sedangkan sejarah dan kebudayaan akan mempengaruhi karakteristik dan sifat kemasyarakatan kota.

Wikipedia (2011:1) menjelaskan: Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Pengertian kota sebagaimana yang diterapkan di Indonesia mencakup pengertian town dan city dalam bahasa Inggris. Selain itu, terdapat pula kapitonim kota yang merupakan satuan administrasi negara di bawah provinsi.

Dinas Pendidikan Nasional (2003:997) menjelaskan bahwa kota adalah:

1. Daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.
2. Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian.

3. Dinding (tembok) yang mengelilingi tempa pertahanan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Kota adalah suatu wilayah geografis tempat bermukim sejumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi, kegiatan utamanya di sektor non agraris serta mempunyai kelengkapan prasarana dan sarana yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kawasan sekitarnya. Kota dengan daya tarik yang dimilikinya, agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya harus memiliki penghuni yang aktif, kreatif, bertanggungjawab, juga memiliki sumber modal.

Beban lingkungan dalam menunjang pembangunan akan semakin berat. Pertumbuhan industri di berbagai bidang serta tekanan terhadap sumber daya alam menyebabkan timbulnya permintaan, inovasi, dan produksi sumber bahan sintesis, yang sering tergolong dalam bahan berbahaya, demikian pula buangnya. Industrialisasi akan membawa serta kebutuhan akan permukiman tenaga kerja yang terkonsentrasi di daerah urban/periurban. Kota-kota akan bertambah, baik jumlah maupun besarnya. Dengan demikian permintaan akan pelayanan kesehatan lingkungan akan bertambah dan semakin kompleks (Slamet, 2009:19).

Perkembangan kota akan diikuti pertambahan jumlah penduduk, yang juga akan di ikuti oleh masalah-masalah sosial dan lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang muncul adalah masalah persampahan. Permasalahan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Sampah memang telah menjadi polemik tersendiri, Perkara sampah tidak hanya merupakan masalah krusial, tetapi telah menjadi problematika kultural yang mendarah daging. Dampak sampah tidak hanya merongrong sebagian kecil

tidak tertangani secara bijaksana, cepat atau lambat, sampah akan menenggelamkan kehidupan dengan beragam dampak negatif yang ditimbulkannya (Tim Penulis PS, 2010:15).

Sampah akan menjadi beban bumi, artinya ada resiko-resiko yang akan ditimbulkannya. Ketidakpedulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk di perkotaan.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa Perancis dengan *l'environnement*. (Siahaan, 2004:4).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu mempergunakan istilah lingkungan hidup di dalam berbagai ketentuan. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatakan lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Otto Soemarmoto dalam Siahaan (2004:4) mendefinisikan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan”.

Mengingat banyak permasalahan yang terdapat dalam lingkungan hidup ini, maka untuk memahami aneka permasalahan yang ada perlu adanya pendekatan yang membatasi diri pada satu kajian khusus tentang lingkungan. Sekarang ini yang diperlukan adalah pendekatan yang bersifat lintas sektor multidisipliner, transdisipliner pendekatan yang sejenis itu.

Pengelolaan lingkungan hidup pada hakekatnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup, baik pada tahap penentuan kebijaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya untuk mencapai kelestarian fungsinya (Putra, dkk, 2003:149).

Selanjutnya beberapa ahli mengadakan pengelompokan lingkungan atas beberapa macam, secara umum dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Lingkungan fisik dan kimia
- b. Lingkungan biologis.
- c. Lingkungan manusia yang meliputi bentuk sosial-ekonomi, sosial-budaya.

(Suratmo, 2007:3).

Adapun uraiannya adalah:

- a. Lingkungan fisik.

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita, yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

b. Lingkungan Biologis.

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa golongan organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.

c. Lingkungan Sosial.

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa konsep ekologi semata, akan tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan

bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membutuhkan air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan bahan-bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu merupakan sumber daya yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

Jadi sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Dengan demikian lingkungan hidup itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun daya alam.

C. Good and Clean Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Good and clean governance diartikan sebagai pemerintahan yang baik dan bersih (Sepriyanto, <http://al-fatih.blogspot.com>, 2011). Istilah yang semakin populer dalam dua dekade ini, semakin menjadi tuntutan, dalam kondisi dimana korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang lainnya begitu menggejala di berbagai belahan dunia. Kekecewaan terhadap *performance* pemerintahan di berbagai negara, baik di negara dunia ketiga maupun di negara

yang baik dan bersih

Toha (2008:95) menjelaskan salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan *clean government*, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta *check and balances*. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip *clean government* dalam ketiadaan partisipasi. (<http://mardoto.wordpress.com>, 2011).

Apapun terjemahannya, *governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun. (Dwiyanto, 2008:77).

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Pengalaman dan kinerja birokrasi di berbagai negara telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama

UNIVERSITAS MEDAN AREA
memerintahi birokrasi sebagai kebutuhan, yang akan mengefisienkan dan meng-

efektifkan pekerjaan pemerintahan. Pandangan kedua, melihat birokrasi sebagai musuh bersama, yang kerjanya hanya mempersulit hidup rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi (yang bersembunyi di balik hukum), dan sebagainya. (Sepriyanto, <http://alfatih.blogspot.com>, 2012).

Padahal secara konseptual, birokrasi, sebagai sebuah organisasi pelaksana pemerintahan, adalah sebuah badan yang netral. Faktor di luar birokrasilah yang akan menentukan wajah birokrasi menjadi baik ataupun jahat, yaitu manusia yang menjalankan birokrasi dan sistem yang dipakai, dimana birokrasi itu hidup dan bekerja. Artinya, bila sistem (politik, pemerintahan dan sosial budaya) yang dipakai oleh suatu negara adalah baik dan para pejabat birokrasi juga orang-orang yang baik, maka birokrasi menjadi sebuah badan yang baik, lagi efektif. Sebaliknya, bila birokrasi itu hidup didalam sebuah sistem yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.

Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Transparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi

dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu. Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam. (Sepriyanto, <http://al-fatih.blogspot.com>, 2012).

Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform* melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi. Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan kesucian dirinya, di lingkungan yang demikian kotor.

Konsep *Good and clean governance* melingkupi semua aspek kinerja pemerintahan termasuk juga dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan konsep *Good and clean governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi amat penting karena dengan adanya *Good and clean governance* maka dalam hal menelurkan kebijakan yang berhubungan dengan publik maka kebijakan tersebut akan mencerminkan suatu akibat bagi pengelolaan lingkungan yang baik.

Meskipun konsep *Good and clean governance* pada dasarnya adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelayanan umum, khususnya pelayanan umum yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintahan, tetapi sifat atau keluaran hasil

lingkungan yang baik.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Moenir (2010:6) bahwa menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal usul timbulnya istilah pelayanan umum. Dengan kata lain antara kepentingan umum ada korelasi dengan pelayanan umum. Kepentingan umum dalam hal ini salah satunya adalah lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melaksanakan fungsi pelayanan umum memiliki hubungan dalam hal pengelolaan lingkungan melalui kebijakan yang dijalkannya serta melalui izin-izin yang diberikannya dalam hal kegiatan suatu badan usaha maupun kegiatan pemerintahan itu sendiri.

Wardhana (2001:159) menjelaskan bahwa kemajuan industri dan teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia ternyata juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang pada akhirnya juga berdampak terhadap manusia. Oleh karena itu penerapan kemajuan industri dan teknologi tersebut harus ditinjau kembali agar penerapan kemajuan industri dan teknologi tersebut dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih baik bagi kelangsungan hidup manusia.

Demikian juga halnya dengan peranan birokrasi dalam menyikapi *good and clean governance*, karena dengan menyikapi *good and clean governance* secara baik dan benar maka akan didapatkan peran yang baik pula dari pada para birokrasi sehingga kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berwawasan lingkungan hidup yang baik pula.

D. Pengertian Sampah

Yang dimaksud dengan sampah menurut Notoatmodjo (2007:187): Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika Membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Notoatmodjo, 2007:188).

Kaleka (2010:1) mengemukakan bahwa :

Rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar. Hampir setiap kegiatan rumah tangga selalu menghasilkan sampah. Misalnya seorang ibu yang memasak, ia menyeisakan potongan sayuran yang tidak ikut dimasak. Ini merupakan material sisa yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna lagi sehingga cepat-cepat disingkirkan dari dapur atau tempat tinggal. Sampah itu dibuang di tempat sampah, di sungai, atau di lahan kosong.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik meliputi:

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

- c. Sampah yang timbul akibat bencana.
- d. Puing bongkaran bangunan.
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik. (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).

Ditinjau dari dasar dan sifatnya sampah dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu :

1. Sampah yang mudah membusuk
2. Sampah yang tidak mudah membusuk
3. Sampah yang mudah terbakar
4. Sampah yang tidak mudah terbakar

Mengenai keempat macam sampah yang telah dikemukakan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sampah yang mudah membusuk

Sampah jenis ini terdiri dari sisa-sisa potongan hewan, sayur-sayuran atau buah-buahan dan makanan lainnya. Sampah ini berasal dari tempat-tempat pemukiman, restoran, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya.

2. Sampah yang tidak mudah membusuk

Sampah jenis ini merupakan bahan-bahan yang berasal dari sisa proses industri seperti kaca dan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Sampah ini biasanya berasal dari rumah tangga dan perkantoran serta pabrik-pabrik.

3. Sampah yang mudah terbakar

Sampah jenis ini adalah sampah kering yang terdiri dari kertas, plastik, karet dan kayu-kayuan yang mudah terbakar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dibindungi Undang-Undang

4. Sampah yang tidak mudah terbakar

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Document Accepted 1/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Sampah jenis ini pada umumnya terdiri dari kaca, kaleng, serta logam atau besi-besi.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu bahwa sampah mempunyai pengaruh terhadap usaha-usaha dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan. Sampah sebagai benda atau bahan yang tidak dipakai lagi harus dibuang atau dimusnahkan, karena dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa sampah tersebut perlu diusahakan sedemikian rupa sehingga keadaan kota kelihatan bersih dan indah sekaligus akan menciptakan lingkungan yang sehat.

Sebaliknya apabila sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan pula keadaan suatu daerah menjadi kotor dan akan membawa penyakit, serta dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan terjadinya banjir.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah dalam hubungan dengan kebersihan dan keindahan sangat tergantung dengan cara pengelolaannya.

Dengan demikian usaha untuk meningkatkan kebersihan bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Begitu juga dengan usaha meningkatkan kebersihan dan keindahan berbagai tempat lainnya seperti pertokoan, pasar-pasar serta tempat-tempat rekreasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Basriyanta (2007:18) berdasarkan asalnya, sampah padat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

1. Sampah organik.

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (Selain kertas, karet dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun kering dan ranting.

2. Sampah anorganik.

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses reknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikro organisme secara keseluruhan. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.

Penggolongan jenis sampah juga dapat didasarkan pada sifat atau komposisi kimianya, mudah tidaknya terbakar, dan karakteristiknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, sampah dibagi menjadi :
 - a. sampah bersifat organik, misalnya sisa sayuran, daun-daunan dan buah-buahan
 - b. sampah bersifat anorganik, diantaranya kaleng bekas, abu dan pecahan

2. Berdasarkan dapat tidaknya sampah terbakar, sampah dibagi menjadi :
 - a. Sampah mudah terbakar, misalnya sampah kertas, kain, plastik, kayu dan karet
 - b. Sampah tidak mudah terbakar, misalnya sampah kaca, logam, kaleng, potongan besi. Sampah jenis ini mempunyai rantai ikatan kimiawi yang panjang, sehingga sukar terurai dan terbakar serta dapat mengakibatkan sanitasi lingkungan menjadi buruk, mengurangi keindahan dan kenyamanan lingkungan serta terganggunya keseimbangan ekologi serta sumber daya alam.
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk, sampah dibagi menjadi :
 - a. Sampah yang sukar membusuk, misalnya plastik, karet, kaleng, abu.
 - b. Sampah yang mudah membusuk, misalnya daging, sisa-sisa makanan, buah-buahan dan lainnya.
4. Berdasarkan karakteristiknya, sampah terdiri dari :
 - a. Sampah basah, yaitu sampah yang dihasilkan dalam proses pengolahan makanan. Jenis sampah ini terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran dari pengolahan.
 - b. Sampah kering, yaitu sampah kering yang terdiri dari sampah yang berasal dari rumah penduduk, pusat perdagangan, kantor, misalnya kertas karbon, kardus, plastik, sobekan kain, dan lain-lain.
 - c. Sampah abu

Yaitu sisa-sisa pembakaran zat-zat yang mudah terbakar, baik dirumah,

b. Binatang mati

Yaitu sampah biologi berupa bangkai-bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan.

c. Sampah dari pembersihan jalan

Yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas, daun-daunan dan lainnya.

d. Sampah industri

Yaitu sampah yang terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri, pengolahan hasil bumi dan industri lainnya

e. Sampah khusus

Yaitu termasuk sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengolahannya misalnya kaleng cet, film bekas, radio aktif, zat teknik dan lain-lain.

f. Rongsokan kendaraan.

Yaitu sampah yang terdiri dari kendaraan bekas milik umum dan pribadi dan suku cadang kendaraan bekas seperti ban mobil, becak dan lain-lain.

E. Sistem Pengelolaan Sampah

Notoarmodjo (2003:168) menjelaskan bahwa sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah-sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit, dan juga binatang serangga sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

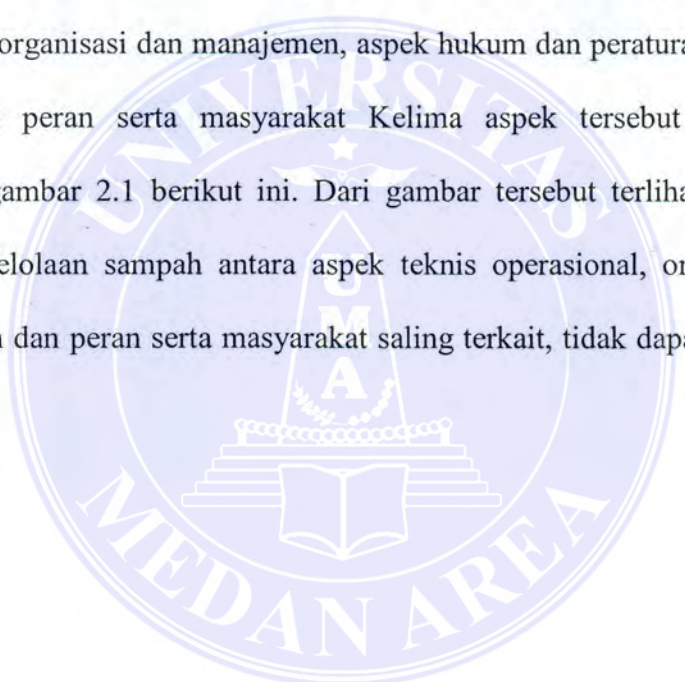
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

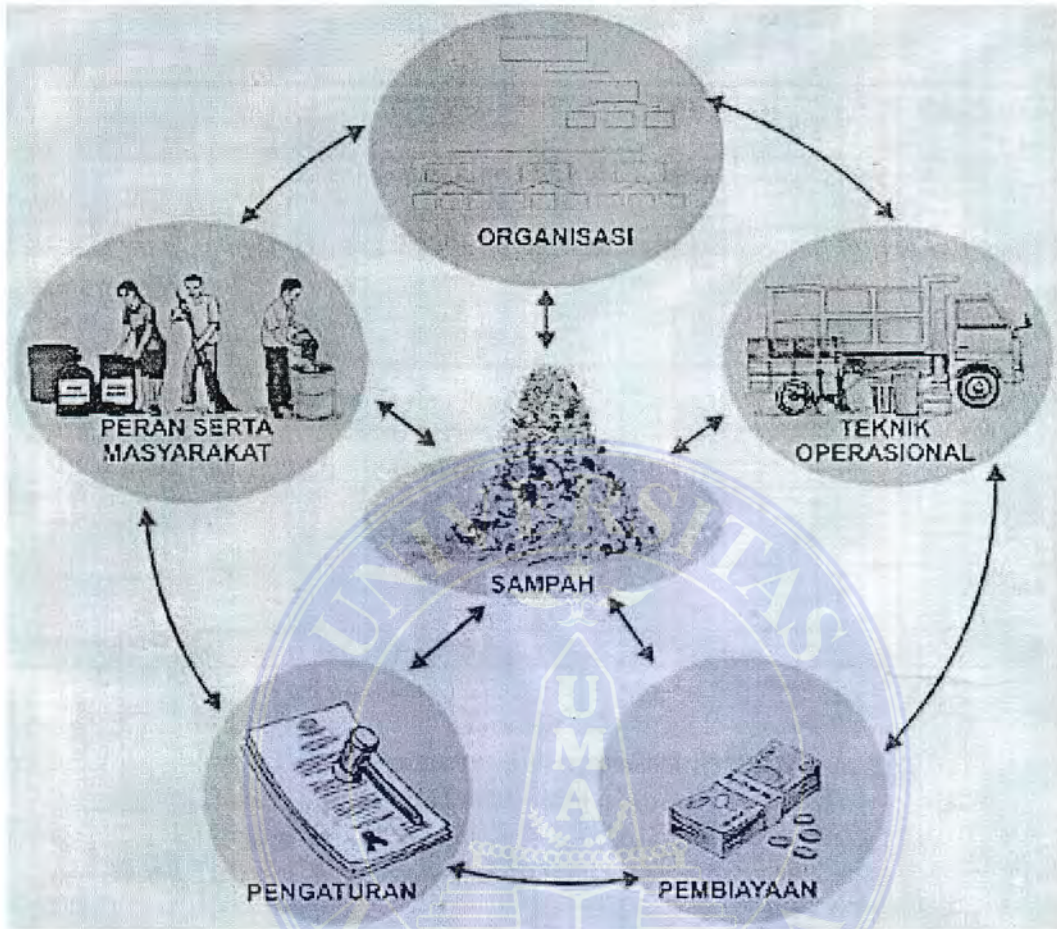
Document Accepted 1/9/23

.....
peminan/penyeban penyakit. Oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik

sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut di atas ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, organisasi, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait, tidak dapat berdiri sendiri.





Gambar 2.1

Skema Manajemen Pengelolaan Sampah

(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002)

1. Aspek Teknik Operasional

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Perencanaan system persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

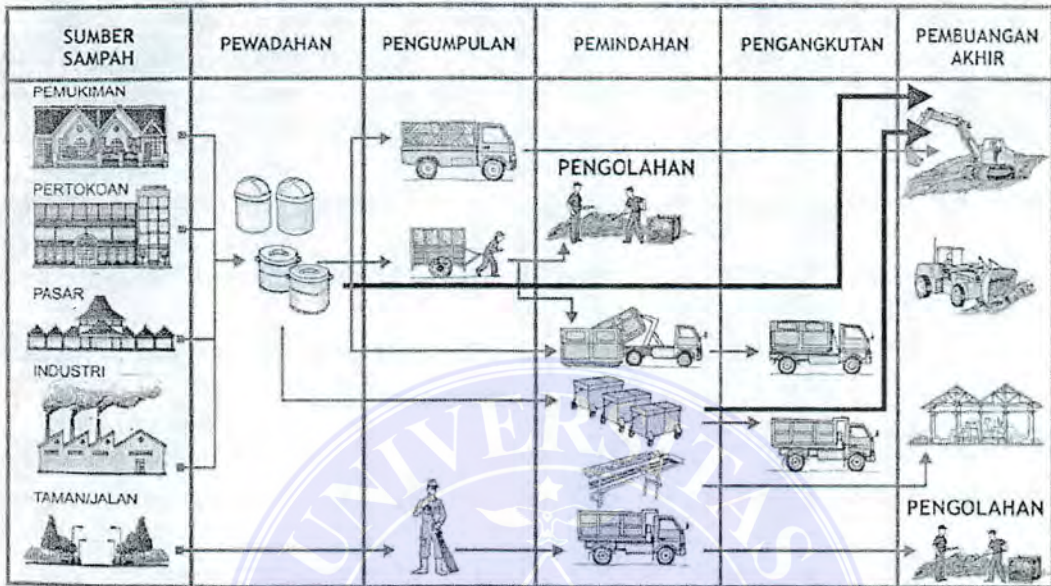
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

pengangkutan, pembuangan/pengolahan.



Gambar 2.2
Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
(Sumber: Standar Nasional Indonesia(SNI 19-2454-2002))

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.

2. Penampungan sampah

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. . Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas

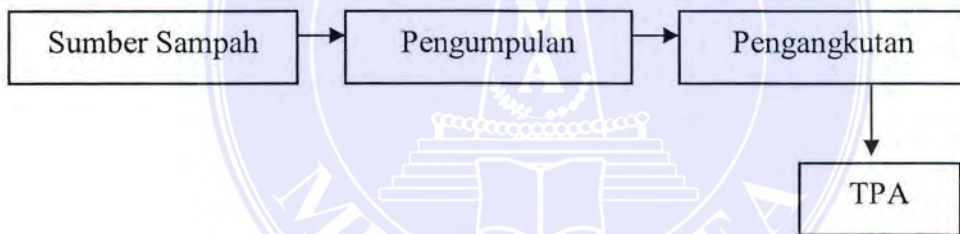
bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).

3. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

a. Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.

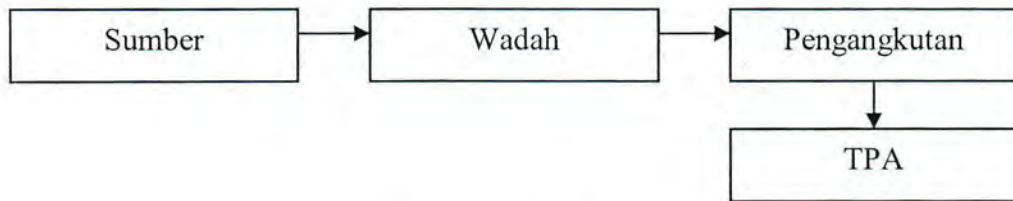


Gambar 2.3

Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung
Sumber: SNI 19-2454-2002

b. Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.



Gambar 2.4

Pola Pengumpulan Sampah Komunal
Sumber: SNI 19-2454-2002

4. Pemindahan sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel (SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut bercampur kembali.

5. Pengangkutan sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengapung
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat.

Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

6. Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu :

a. Metode *Open Dumping*

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. Metode *Controlled Landfill* (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang

c. Metode *Sanitary landfill* (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sample

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga sedangkan sample bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Sugiono (2002:31) di dalam bukunya metode penelitian Administrasi. Menyatakan bahwa populasi adalah obyek atau subjek yang mempunyai kwantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan sample Suharsini Arikunto (2007:102) menyatakan: Sample adalah sebagai atau mewakili populasi yang diteliti”.

Adapun yang menjadi populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 180 orang pegawai petugas kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan.

1. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari atau mengumpulkan keterangan atau bahan dari buku yang berhubungan dengan masalah yang di tulis pada penelitian.

2. Penelitian lapangan (field research) yaitu turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, dengan cara melakukan observasi, petugas lapangan dan lingkungan kerja.

C. Variabel dan Defenisi Operasional

Adanya variabel dalam suatu penelitian akan menentukan adanya hubungan secara sistematis. Dalam penelitian ini akan dikemukakan dua variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (independent variabel)

Yaitu variabel yang disangka atau dianggap sebagai sebab dari suatu gejala atau variabel yang diselidiki pengaruhnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah : Petugas Kebersihan dengan indikatornya :

- a. Jumlah Petugas : 180 Orang
- b. Wilayah kerja :Areal lingkungan kantor bupati Jl. Protokol, Kota Lubuk Pakam.
- c. Peranan petugas kebersihan.

2. Variabel Terikat (dependent variabel)

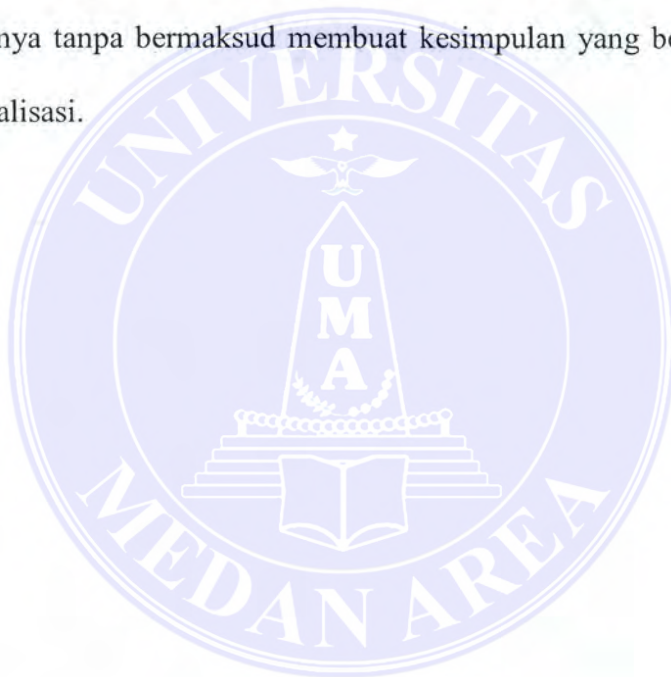
Yaitu yang di duga akan timbul sebagai pengaruh variabel bebas atau yang di sangka. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah, kebersihan lingkungan efektif dan efisien, dengan indikatornya :

- a. Kebersihan rumah tangga : - Limbah rumah tangga
- b. Kebersihan lingkungan : - Saluran air
- Taman kota
- Wilayah perkantoran

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini metode yang dipergunakan adalah metode analisis data yang terjadi pada keadaan yang sekarang ini, dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisisnya.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan armada pengangkutan sampah belum optimal. Dengan armada pengangkutan yang terdiri dari 10 unit *Arm Roll Truck* yang beritansi 6 trip/hari, 10 unit *Dump Truck* yang beritansi 2 trip/hari ternyata hanya mampu mengangkut 79,24 % atau 3.396 m³ dari total timbulan sampah Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
2. Lokasi penempatan TPS atau kontainer yang strategis adalah di lahan yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten, agak jauh dari permukiman, dapat dilalui oleh kendaraan/truk pengangkut sampah serta pengangkutan sampahnya tidak boleh lebih dari satu hari (24 jam). Sistem TPS yang tepat untuk Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang adalah jenis kontainer tertutup atau dengan sistem transfer depo.
3. Penanganan sampah dengan Sistem *Open Dumping* yang saat ini diterapkan di TPA Sampah Tanjung Morawa sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di TPA. Hal ini ditunjukkan dari kualitas air lindi yang telah melebihi Baku Mutu Lingkungan, sedangkan kualitas udara ambien di TPA Tanjung Morawa masih memenuhi Baku Mutu Lingkungan.

B. Saran

1. Perlu dibentuknya Dinas Kebersihan yang menangani permasalahan sampah di Kabupaten Deli Serdang selama ini pengelolaan sampah di lakukan oleh pihak kecamatan.
2. Perlu penambahan jumlah Gerobak sampah dan TPS (kontainer) yang sesuai dengan kriteria standar, sehingga jumlah sampah yang terkumpul dapat diangkat dalam waktu kurang dari 24 jam.
3. Perlu dilakukan peremajaan terhadap kendaraan pengumpul/gerobak dan truk pengangkut sampah, serta penambahan jumlah armada pengangkutan sampah sehingga tingkat pelayanan sampah semakin meningkat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basriyanta, 2007, *Memanen Sampah*, Yogyakarta: Kanisus.
- Dwiyanto, Agus, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gallion, Arthur B, dan Eisner, Simon, 1996, *Pengantar Perancangan Kota*, Alih Bahasa Sussongko dan Januar Wahtu Indarto, Jakarta: Erlangga.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hersey, Paul dan Blanchard, Ken, 1992, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga.
- Kaleka, Norbertus, 2010, *Kompos Dari Sampah Keluarga*, Surakarta: Delta Media.
- Moenir, HAS, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Nasional, Dinas Pendidikan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Nasution, S dan Thomas, M, 2010, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi Disertasi Makalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekijo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta.

- PS. Tim Penulis, 2010, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Purwendro, Setyo dan Nurhidayat, 2010, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk, 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, NHT, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Slamet, Juli Soemirat, 2009, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soefian, 2010, *Sukses Membuat Kompos Dari Sampah*, Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, 2006, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suratmo, F. Gunawan, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thoah, Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Wardhana, Wisnu Arya, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi.
- Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta: Andi.

B. Internet/Makalah:

<http://definisi-pengertian.blogspot.com>

Kelompok Mahasiswa Prodi Matematika, “Mengkritis Clean and Good Governance di Indonesia”, <http://mardoto.wordpress.com>.

Sepriyanto, “Syariat Islam Dalam Mewujudkan Clean Governance and Good Government”, http://al_farih.blogspot.com.

Wikipedia Indonesia, “Kota”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kota>

